SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Program Studi Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh :

MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN EL SULTHANI
NIM. E1011181110

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

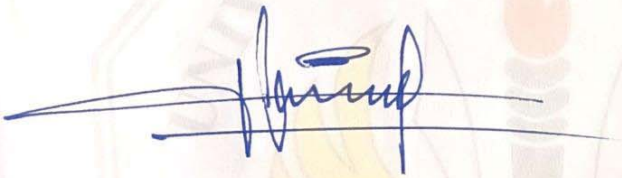
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Muhammad Fikri Ramadhan El Sulthani
E1011181110

Disetujui Oleh:

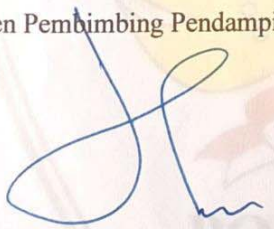
Dosen Pembimbing Utama



Dr.Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 196405271992021001

Tanggal: .....

Dosen Pembimbing Pendamping



Martinus, S.Sos.M.AB
NIP 197212272006041002

Tanggal: .....

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
Muhammad Fikri Ramadhan El Sulthani
E1011181110

Dipertahankan	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Selasa, 29 Juli 2025
Waktu	: 10.00 WIB
Tempat	: Ruang 2

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Yulius Yohanes, M.Si	Martinus, S.Sos, M.AB
NIP. 196405271992021001	NIP. 197212272006041002

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. Asmadi, M.Si	Ade Risna Sari, SH, M.Si
NIP. 196202041988101001	NIDN. 0030097307

Disahkan Oleh
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRACT

This research focuses on the application of Sambas Regency Regional Regulation No. 05 of 2018 on the Village Consultative Body (BPD) in Dungun Laut Village. The research background identifies challenges in the effectiveness of village governance. This regulation is meant to enhance the position of the BPD as a legislative body, supervisory institution, and conduit of community aspirations. Nevertheless, its application is hindered by major challenges, including poor knowledge among BPD members, insufficient facilities, poor technological skills, and the prevalence of patrimonial culture. This qualitative descriptive study examines six variables using Van Meter and Van Horn theory of public policy implementation, which include policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, dispositions of implementers, communication, and the social, economic, and political environment. The results indicate that the supervisory role of BPD has not been implemented optimally. The policy standards are too idealistic; resources are scarce (budget, facilities, human resources); the nature of implementing agents is suboptimal (lack of specialization, recruitment based on kinship); the dispositions of implementers are negative (reluctance to supervise due to patrimonial culture); communication is ineffective (minimal socialization, poor documentation); and the local environment is constraining (cultural, economic, and political issues). All these barriers are detrimental to the BPD performing its duties, thus undermining the accountability of the Village Head.

Keywords*: Policy Implementation, Regional Regulation, Performance Supervision*

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 05 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dungun Laut. Fungsi pengawasan BPD belum efektif karena kendala informasi, pemahaman, anggaran, teknologi, dan budaya patrimonial. Lemahnya pengawasan ini berdampak pada kinerja kepala desa dan kepercayaan masyarakat, sehingga penelitian ini bertujuan memahami masalah dan merekomendasikan peningkatan efektivitas pengawasan BPD demi akuntabilitas desa.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Van Meter & Van Horn (1975), yang menganalisis enam variabel: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kerangka ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks fungsi pengawasan BPD.

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, bertujuan menggambarkan dan menganalisis data tanpa generalisasi. Data dikumpulkan melalui observasi pasif, wawancara terstruktur dengan berbagai informan (Kepala Desa, BPD, masyarakat), dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk menarik kesimpulan.

Desa Dungun Laut memiliki luas 11,79 km² dengan topografi pesisir, didominasi pertanian dan permukiman, serta hutan mangrove. Akses transportasi

sebagian besar aspal, namun ada kendala jalan tanah. Penduduknya 3.489 jiwa, mayoritas Islam, bekerja di pertanian/peternakan, dengan tingkat pendidikan bervariasi. Struktur pemerintahan desa dan BPD telah terbentuk, namun BPD menghadapi tantangan teknis dan sosial-budaya dalam operasionalnya.

Implementasi pengawasan BPD di Desa Dungun Laut belum optimal. Kebijakan terlalu idealis tanpa panduan jelas, sumber daya (finansial, fasilitas, SDM) sangat terbatas, dan karakteristik agen pelaksana kurang spesifik. Disposisi pelaksana negatif karena budaya patrimonial dan hubungan kekerabatan. Komunikasi tidak efektif akibat sosialisasi minim dan dokumentasi buruk. Lingkungan lokal (budaya, ekonomi, politik) juga menghambat pengawasan objektif, menyebabkan akuntabilitas Kepala Desa tidak terjamin.

Disimpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan BPD di Desa Dungun Laut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakselarasan antara desain kebijakan yang idealis dengan kapasitas implementasi lokal yang rendah, serta lingkungan yang tidak mendukung. Interaksi kompleks dari variabel-variabel ini (ukuran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen, disposisi, komunikasi, lingkungan) menciptakan siklus kegagalan, mereduksi pengawasan BPD menjadi formalitas, dan melemahkan akuntabilitas Kepala Desa.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD, direkomendasikan revisi Perda dengan SOP jelas dan kewenangan hukum BPD. Pemerintah Desa harus mengalokasikan anggaran dan fasilitas memadai, serta memberikan pelatihan digital. BPD perlu membentuk divisi pengawasan khusus dan meningkatkan koordinasi. Pelatihan etika birokrasi, insentif non-material, dan

kode etik diperlukan untuk mengatasi disposisi negatif. Komunikasi harus diperbaiki melalui sosialisasi komprehensif, sistem dokumentasi terstruktur, dan forum teknis rutin. Terakhir, edukasi publik dan pemberdayaan ekonomi diperlukan untuk mengubah lingkungan yang menghambat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fikri Ramadhan El Sulthani

Nomor Mahasiswa : E1011181110

Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang sepengetahuan saya, dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 6 Juni 2025

ng membuat pernyataan



Muhammad Fikri Ramadhan El Sulthani

NIM. E1011181110

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"
(Al-Baqarah: 153)

"Sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya, yakin usaha sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan hanya mengimginkan hasil akhir dan tahu beres tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyatannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stress percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses".

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada orang yang tercinta:

1. **Ayahanda H. M.Nasharuddin, S.E** dan **Ibunda Hj. Asniwati**, Adik **M. Fakhri Maulana**.
2. Istri saya **Fuzi Khusnul khotiqah** ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai.
3. Ananda **Feeha Niscala Irish Sulthani** menyemangati dan memotivasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayahnya akhirnya Skripsi yang berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas"* ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan Skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi in merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan Skripsi in tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menvelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan in penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Yulius Yohanes, M.Si, selaku dosen pembimbing pertama, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, semangat, memotivasi penulis untuk selalu menambah wawasan, memberikan bimbingan, termasuk memberi masukan-masukan yang kesemuanya dalam

rangka penulisan skripsi ini.

3. Martinus, S.Sos, M.AB, selaku dosen pembimbing kedua, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan perhatian, semangat bimbingan, arahan maupun masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Asmadi, M.Si, selaku dosen penguji utama yang telah memberikan arahan dan masukan serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ade Risna Sari, SH, M.Si, selaku dosen penguji pendamping yang telah memberikan arahan dan masukan serta saran-saran dalam penulisan skripsi.
6. Wakil Dekan, Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Kepala BPD Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas beserta Jajarannya yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas beserta jajarannya yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Masyarakat Desa Dungun Laut yang telah berpartisipasi aktif, memberikan data, waktu, dan dukungan selama penelitian berlangsung, serta atas keramahan dan keterbukaan yang diberikan kepada peneliti.

Penulis Menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sehingga mampu memberikan sumbangsih bagi studi penelitian dan bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Sambas, 15 Juli 2025

Muhammad Fikri Ramadhan El Sulthani

NIM. E1011181110

DAFTAR ISI

Hal

SKRIPSI .....
LEMBAR PENGESAHAN .....
ABSTRAK iv
ABSTRACT iv
RINGKASAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR TABEL xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Fokus Penelitian 6
1.4 Rumusan Masalah 6
1.5 Tujuan Penelitian 6
1.6 Manfaat Penelitian 7
1.6.1 Manfaat Teoritis 7
1.6.2 Manfaat Praktis 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Kebijakan Publik 9
2.2 Implementasi Kebijakan Publik 14
2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik 16
2.2.2 Teori Pengawasan Publik 27
2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 29
2.2.4 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 30
2.2.5 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 30

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 31
2.4 Kerangka Pikir Penelitian 32
2.5 Pertanyaan Penelitian 34
BAB III METODE PENELITIAN 35
3.1 Jenis Penelitian 35
3.2 Langkah-langkah Penelitian 35
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 38
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 39
3.4.1 Subjek Penelitian 39
3.4.2 Objek Penelitian 40
3.5 Teknik Pengumpulan Data 40
3.6 Alat Pengumpulan Data 43
3.7 Teknik Keabsahan Data 44
3.8 Teknik Analisis Data 45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 47
4.1 Profil Desa Dungun Laut 47
4.1.1 Kondisi Geografis 47
4.1.2 Kondisi Demografis 50
4.2 Struktur Pemerintahan Desa 52
4.2.1 Pemerintah Desa 52
4.2.2 Badan Permusyawaratan Desa 56
4.3 Profil Badan Permusyawaratan Desa 60
4.3.1 Komposisi Keanggotaan 60
4.3.2 Sarana dan Prasarana 62
4.4 Tantangan Umum Lokasi Penelitian 66
4.4.1 Aspek Teknis 67
4.4.2 Aspek Sosial-Budaya 68
4.4.3 Aspek Kelembagaan 70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 73
5.1 Hasil Penelitian 73
5.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan 73

5.1.2 Sumber Daya 79
5.1.3 Komunikasi Antar Organisasi 85
5.1.4 Karakteristik Agen Pelaksana.....92
5.1.5 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.....97
5.1.6 Disposisi/Sikap Pelaksana 104
BAB VI PENUTUP 110
6.1 Simpulan.....110
6.2 Rekomendasi 112
6.3 Keterbatasan Penelitian 114
DAFTAR PUSTAKA 116
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 119
RIWAYAT HIDUP 133

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Hal**

4. 1 Peta Desa Dungun Laut.....50
4. 2 Stuktur Organisasi Pemerintah Desa Dungun Laut 56
4. 3 Struktur Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa Dungun Laut.....60
4. 4 Printer.....63
4. 5 Kipas Angin 64
4. 6 Ruang Rapat/Koordinasi Desa 65
5. 1 Siklus Kegagalan Implementasi Perda.....83
5. 2 Musyawarah Desa Khusus Dana Kinerja Desa.....86

DAFTAR TABEL

Tabel **Hal**

3. 1 Waktu Peneliti 39
4. 1 Data Demografis Desa Dungun Laut 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga pengawas kunci yang bertugas memastikan kebijakan kepala desa selaras dengan aspirasi masyarakat. Namun, implementasi fungsi pengawasan BPD seringkali tidak efektif, terutama di wilayah pedesaan dengan karakteristik sosio-kultural unik seperti Desa Dungun Laut, Kabupaten Sambas. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan otonomi desa yang diharapkan.

Proses implementasi fungsi pengawasan BPD di Desa Dungun Laut menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Hasil wawancara dengan anggota BPD pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa 85% dari mereka mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen kinerja kepala desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kesulitan ini mencerminkan adanya hambatan dalam transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi bagian dari fungsi pengawasan BPD, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja kepala desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD cenderung bersifat formalitas tanpa tindak lanjut konkret. Rapat evaluasi yang seharusnya menjadi sarana untuk

menilai kinerja kepala desa seringkali batal dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran dan absennya anggota. Hal ini menciptakan kesan bahwa pengawasan BPD tidak berjalan efektif, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pengawasan yang tidak efektif dapat berakibat pada penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat.

Dampak dari lemahnya pengawasan BPD dapat dilihat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala desa. Alokasi APBDes 2024 yang tidak transparan, misalnya, menunjukkan bahwa proyek fisik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fenomena ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan warga, yang tercermin dari survei kepercayaan masyarakat pada Januari 2025, di mana 72% warga menyatakan tidak percaya terhadap pemerintah desa akibat minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan BPD yang lemah berkontribusi pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Akar masalah yang dihadapi BPD di Desa Dungun Laut bersifat multidimensi. Pertama, kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting. Sebanyak 80% anggota BPD tidak memiliki latar belakang administrasi publik atau hukum, dan pelatihan pengawasan tidak dilaksanakan secara rutin. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Tanpa pelatihan yang memadai, anggota BPD tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik,

yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pengawasan yang dilakukan.

Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penentu dalam efektivitas BPD. Interaksi antara BPD dan Camat terbatas, dengan frekuensi pertemuan kurang dari empat kali dalam setahun. Keterbatasan ini mengisolasi BPD dari sumber daya dan pendampingan teknis yang seharusnya dapat membantu mereka dalam menjalankan tugasnya. Tanpa dukungan yang memadai, BPD akan kesulitan dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi tantangan tersendiri. Hanya 30% warga yang aktif dalam musyawarah pengawasan, menunjukkan adanya budaya pasivitas yang mengikis kontrol sosial. Hal ini mengakibatkan suara masyarakat tidak terdengar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Ketidakaktifan masyarakat dalam proses pengawasan dapat memperburuk situasi, di mana kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengurai kompleksitas implementasi Perda Kabupaten Sambas No. 5 Tahun 2018 tentang BPD di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi berbasis bukti guna memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa melalui pengawasan BPD yang efektif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan tata kelola pemerintahan desa.

Dalam konteks ini, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa BPD

memiliki peran penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pala et al. (2023) menekankan bahwa fungsi BPD dalam hal ini sangat krusial untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran BPD dalam pengawasan dan partisipasi masyarakat perlu menjadi fokus utama dalam penelitian ini (Pala et al., 2023).

Selain itu, Yatim dan Sukmana (2024) juga menyoroti kontribusi BPD terhadap pembangunan di tingkat desa. Penelitian mereka menunjukkan bahwa BPD yang efektif dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk memperkuat fungsi pengawasan BPD di Desa Dungun Laut (Yatim & Sukmana, 2024).

Situmorang et al. (2024) menambahkan bahwa peran BPD dalam pembuatan peraturan desa sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana BPD dapat berfungsi secara optimal dalam konteks Desa Dungun Laut (Situmorang et al., 2024).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas BPD dalam pengawasan dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat menciptakan

pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan transparan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa masalah kritis yang teridentifikasi dalam implementasi fungsi pengawasan BPD di Desa Dungun Laut.

1. Rgulasi operasional

   Tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) turunan yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan kinerja kepala desa menjadi kendala utama. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam mekanisme pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BPD, sehingga fungsi pengawasan menjadi tidak terarah dan kurang efektif.

2. Struktur kelembagaan

   Tidak adanya divisi khusus pengawasan dalam organisasi BPD menghambat kemampuan lembaga ini untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Tanpa adanya pembagian tugas yang jelas dan spesifik, anggota BPD kesulitan dalam melaksanakan pengawasan secara sistematis dan terencana, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

3. Patronase politik

   Pola hubungan patron-klien antara kepala desa dan anggota BPD seringkali menciptakan ketergantungan yang menghambat objektivitas dalam pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak kritis dan cenderung mengabaikan kepentingan

masyarakat, sehingga mengurangi akuntabilitas pemerintah desa. Identifikasi masalah ini menjadi penting untuk merumuskan solusi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas pengawasan BPD di Desa Dungun Laut.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada implementasi fungsi pengawasan administratif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dungun Laut. Fokus ini diambil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 5 Tahun 2018, yang mengatur peran dan tanggung jawab BPD dalam pengawasan kebijakan desa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 di Desa Dungun Laut?"

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan yaitu untuk "Menganalisis implementasi fungsi pengawasan

kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 di Desa Dungun Laut.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik, khususnya kajian Kebijakan Publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat demi lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Sambas tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
b. Bagi masyarakat Desa Dungun Laut, diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintahan desanya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian terhadap desanya.
c. Bagi peneliti/penelitian selanjutnya, temuan dalam skripsi ini menyediakan basis empiris dan metodologis untuk mengembangkan studi komparatif implementasi Perda serupa di desa-desa lain di Kabupaten Sambas, terutama yang memiliki karakteristik geografis dan sosial-budaya mirip (pesisir, masyarakat agraris, struktur patrimonial), dan juga merancang model evaluasi kebijakan berbasis *gap analysis* yang mengintegrasikan empat variabel kritis Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) dengan konteks kearifan lokal.